

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUDAH  
PEMEKARAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**

**ARTIKEL ILMIAH**



**Oleh :**

**LIDIA MARIANI**  
**NIM . 05295 / 2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode Juni 2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUDAH PEMEKARAN DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)

Oleh :  
**LIDIA MARIANI**  
NIM . 05295 / 2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Juni 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Juni 2013

**Pembimbing I**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

**Pembimbing II**



**Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19730723 200604 2 001

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Lidia Mariani  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: lidiamariani@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris : 1) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. (2) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. (3) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah. (4) Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek efisiensi anggaran sesudah pemekaran daerah. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *Purposive Sampling* pada daerah yang melakukan pemekaran di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan situs [www.dpjk.depkeu.go.id](http://www.dpjk.depkeu.go.id). Teknik pengolahan data yang digunakan adalah uji t (*independent sample t-test*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. 2). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. 3). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah. 4). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja pemerintahan setiap tahunnya, dan melakukan penyusunan strategi agar kinerja pemerintahan untuk kedepannya lebih bagus. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : desentralisasi fiskal, upaya fiskal, kemandirian pembiayaan, dan efisiensi anggaran

## ABSTRACT

*This research aimed to get the empiric evidences : 1) the difference government financial performance in fiscal decentralization after region expansion. 2) the difference government financial performance in fiscal effort after region expansion. 3) the difference government financial performance in financing autonomy after region expansion. 4) the difference government financial performance in budget efficiency after region expansion. This research is quantitative descriptive. The population of this research is regency/city governments in West Sumatera. The sampling use Purposive sampling in all regions that did expansion in West Sumatera. The data used in this research is secondary data from BPS West Sumatera and from [www.dpjk.depkeu.go.id](http://www.dpjk.depkeu.go.id). The data processing use (independent sample t test). The result shows that : 1) there is not a difference government financial performance in fiscal decentralization after region expansion. 2) there is a difference government financial performance in fiscal effort after region expansion, 3) there is a difference government financial performance in financing autonomy after region expansion, 4) there is not a difference government financial performance in budget efficiency after region expansion. Based on the above results, it is suggested that the local government to evaluate the performance of the government each year, and undertake the preparation of a strategy for the performance of the government for a better future. For the next researcher, suggest to do the expansion in place and research time, and also use the other ratio as the analysis tool for government financial performance.*

*Keywords: fiscal decentralization, fiscal measures, financial independence, and efficiency of budget*

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan (Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No.32 Tahun 2004).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah karena pemekaran bertujuan untuk men-sejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemekaran daerah dalam tatanan

filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129-/2000). Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2010).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, adanya indikator kinerja akan membantu pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan ang-

garan dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah.

Desentralisasi fiskal, merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (Halim, 2007). Membahas mengenai desentralisasi tidak lepas dari masalah sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sentralisasi dan desentralisasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, pada dasarnya berkenaan dengan "*delegation of authority*" yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan (Widodo, 2001). Upaya Fiskal yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007). Efisiensi anggaran yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya (Halim, 2007).

Pemekaran daerah menurut UU no 32 tahun 2004 adalah pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu

daerah, setelah adanya UU no.22 tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Susantih (2009).

Secara faktual di Indonesia pada saat ini banyak terjadi kasus penyimpangan kinerja keuangan yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam keuangan daerah seperti yang disimpulkan BPK bahwa penetapan penyaluran dan penerimaan dana perimbangan belum sepenuhnya transparan, belum akuntabel, belum memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta belum adanya harmonisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan APBD) untuk memperjelas sasaran pembangunan nasional dan daerah.(Harian Umum PELITA, 4 Oktober 2008).

Penelitian yang pernah dilakukan Mustika (2009) yang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah" tahun 2000-2003 dan 2004-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabuptaen Padang Pariaman pada masa sebelum pemekaran daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan masa sesudah pemekaran daerah, sebelum pemekaran rata-rata tingkat kemandirian adalah 3,31%, sedangkan rata-rata tingkat ke-

mandirian sesudah pemekaran adalah 3,47%.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek kemampuan pembiayaan sesudah pemekaran daerah.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek kinerja pengeluaran (efisiensi penggunaan anggaran) sesudah pemekaran daerah.

## **2. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

### **2.1 Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih (PP Nomor 78 Tahun 2007). Pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah.

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi
- b. Meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.
- c. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- d. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- e. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- f. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- g. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- h. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 disebutkan tentang sumber pendapatan daerah otonom yaitu :

- 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
  - (a) Pajak daerah,
  - (b) Retribusi daerah,
  - (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - (d) Lain-lain pendapatan asli yang sah.
- 2). Pendapatan yang berasal dari pemerintahan pusat
  - (a) Sumbangan dari pemerintah
  - (b) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
  - (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.2 Keuangan Daerah**

Menurut Mamesah (1995) dalam Halim (2007) keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Yani (2009) ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### 2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi (2007) dalam Halim, 2007):

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan Keputusan
- e. Memotivasi Pegawai.
- f. Menciptakan Akuntabilitas Publik.

### 2.4 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2002) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Berdasarkan latar belakang diatas maka hipotesis didapat sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah.
- H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah.
- H<sub>3</sub> : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah.
- H<sub>4</sub> : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan suatu gejala atau peristiwa seperti apa adanya. Adapun data yang digunakan adalah data yang berbentuk angka (data kuantitatif).

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Metode sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dari sekian banyak populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat 12 Kabupaten dan 7 Kota dan hanya 5 daerah yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji beda pada daerah pemekaran diantaranya:

- a. Kota Pariaman pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman
- b. Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman
- c. Kabupaten Kepulauan Mentawai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman
- d. Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sijunjung
- e. Kabupaten Solok Selatan pemekaran dari Kabupaten Solok

Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten/Kota menjadi dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode sesudah pemekaran daerah berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala daerah setiap tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data ini digolongkan pada data sekunder,

yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain berupa Laporan Keuangan Daerah. Data ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Dilihat dari segi sifatnya, data yang digunakan merupakan data kuantitatif yaitu berupa angka-angka. Berdasarkan waktu pengumpulannya, maka dalam penelitian ini data digolongkan pada *time series-cross section* (poling data), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan.

##### b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan pada Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat.

#### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mencari data yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat.

#### 3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio menurut Musgrave dan Abdul Halim (2001) yaitu terdapat pada halaman lampiran.

#### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan uji beda dengan uji-t dengan *Independent Sample t-Test* untuk membandingkan rata-rata dari sampel bebas yaitu untuk melihat apakah berbeda atau sama pada tingkat  $\alpha=0,1$ . Pada penelitian ini akan digunakan

uji non-parametric yaitu Kolmogorov-Smirnov.

### 3.7 Defenisi Operasional

- a. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas ; efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa ; kualitas barang dan jasa ; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
- b. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
- d. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.
  - 1) Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan.
  - 2) Upaya Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah.
  - 3) Tingkat Kemandirian Pembiayaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memnuhi kebutuhan daerahnya.
  - 4) Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran adalah ukuran yang menunjukkan

tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya.

## 4. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Deskripsi Data

#### 1) Desentralisasi Fiskal Sesudah Pemekaran Daerah

Persentase desentralisasi fiskal merupakan persentase perbandingan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan total penerimaan daerah. Untuk mengetahui persentase penerimaan daerah, digunakan rumus berikut:

$$= \frac{BHPBP}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

#### 2) Upaya Fiskal Sesudah Pemekaran Daerah

Persentase upaya fiskal merupakan persentase perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk mengetahui persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, digunakan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD}} \times 100\%$$

#### 3) Kemandirian Pembiayaan Sesudah Pemekaran Daerah

Persentase kemandirian pembiayaan merupakan persentase perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pengeluaran rutin daerah. Untuk mengetahui persentase pendapatan terhadap total pengeluaran daerah, digunakan rumus berikut:

$$= \frac{PAD}{\text{Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

#### 4).Efisiensi Anggaran Sesudah Pemekaran Daerah

Persentase kemandirian pembiayaan merupakan persentase perbandingan total pengeluaran lainnya dengan total belanja daerah. Untuk mengetahui persentase pen-

dapatan terhadap total penerimaan daerah, digunakan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Total Pengeluaran Lainnya}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## b. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel dilampiran, nilai rata-rata untuk desentralisasi fiskal daerah lama (induk) sesudah pemekaran daerah 7,0067 dan daerah baru (anak) sesudah pemekaran daerah adalah sebesar 6,3022. Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah pemekaran daerah lebih kecil dibandingkan sebelum adanya pemekaran daerah dan secara keseluruhan desentralisasi fiskal mengalami penurunan sesudah pemekaran daerah.

Nilai rata-rata untuk upaya fiskal daerah lama sesudah pemekaran daerah adalah 2,8627 dan nilai rata-rata daerah baru sesudah adanya pemekaran daerah adalah sebesar 15,4189. Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah pemekaran daerah lebih besar dibandingkan sebelum adanya pemekaran daerah dan secara keseluruhan upaya fiskal mengalami kenaikan sesudah pemekaran daerah.

Untuk kemandirian pembiayaan nilai rata-rata daerah lama sesudah pemekaran daerah adalah 4,6873 dan nilai rata-rata daerah baru sesudah pemekaran daerah adalah sebesar 38,1651. Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah pemekaran daerah lebih besar dibandingkan sebelum adanya pemekaran daerah dan secara keseluruhan kemandirian pembiayaan mengalami kenaikan sesudah pemekaran daerah.

Nilai rata-rata untuk efisiensi anggaran daerah lama sesudah pemekaran daerah adalah 2,5501 dan nilai rata-rata daerah baru sesudah adanya pemekaran daerah adalah sebesar 1,8092. Dari hasil tersebut berarti rata-rata sesudah pemekaran daerah lebih kecil dibandingkan sebelum adanya pemekaran daerah dan secara keseluruhan upaya fiskal mengalami penurunan sesudah pemekaran daerah.

## c. Pengujian Hipotesis

### 1) Hipotesis Pertama

Tabel 3 menggambarkan hasil uji statistik desentralisasi fiskal. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai rata-rata (*Mean*) dari desentralisasi fiskal daerah lama sesudah pemekaran daerah adalah sebesar 7,0067 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (*Mean*) daerah baru sesudah pemekaran daerah yaitu sebesar 6,3022. Perbedaan ini dijabarkan dalam lampiran *independent sample test*.

Tabel menjelaskan hasil uji t desentralisasi fiskal. Disamping itu terdapat perbedaan (*mean*) sebesar 0,71. Ini berarti rata-rata desentralisasi fiskal daerah lama sesudah pemekaran daerah lebih tinggi dibandingkan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Perbedaan sebesar 0,71 tersebut mempunyai range antara *lower* (batas bawah) sebesar -2,417 sampai *upper* (batas atas) sebesar 4,590.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat perbedaan antara daerah lama dengan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Dari hasil statistik diketahui bahwa *t* hitung 0,520 dan *prob-value* 0,291 > tingkat signifikan 0,1 maka *H<sub>0</sub>* diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara desentralisasi fiskal kabupaten lama dengan daerah baru hasil pemekaran.

### 2) Hipotesis Kedua

Tabel 4 menggambarkan hasil uji statistik upaya fiskal. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai rata-rata (*Mean*) dari upaya fiskal daerah lama adalah sebesar 2,86 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata (*Mean*) sesudah pemekaran daerah yaitu sebesar 15,42. Perbedaan ini dijabarkan dalam tabel dilampiran.

Tabel ini menjelaskan hasil uji t upaya fiskal. Disamping itu terdapat perbedaan (*mean*) sebesar -12,556. Ini berarti rata-rata upaya fiskal daerah lama lebih rendah dibandingkan sesudah pemekaran daerah. Perbedaan sebesar -12,556 tersebut

mempunyai range antara *lower* (batas bawah) sebesar -25,544 sampai *upper* (batas atas) sebesar 0,432.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan antara daerah lama dengan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Dari hasil statistik diketahui bahwa  $t$  hitung -1,621 dan *prob-value*  $0,007 < \text{tingkat signifikan } 0,1$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara upaya fiskal daerah lama dengan daerah baru sesudah adanya pemekaran daerah.

### 3) Hipotesis Ketiga

Tabel 5 menggambarkan hasil uji statistik kemandirian pembiayaan. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai rata-rata (*Mean*) dari kemandirian pembiayaan daerah lama pemekaran daerah adalah sebesar 4,69 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata (*Mean*) daerah baru sesudah pemekaran daerah yaitu sebesar 38,17. Perbedaan ini dijabarkan dalam tabel pada lampiran.

Tabel ini menjelaskan hasil uji  $t$  kemandirian pembiayaan. Disamping itu terdapat perbedaan (*mean*) sebesar -33,3477. Ini berarti rata-rata kemandirian pembiayaan daerah lama pemekaran daerah lebih rendah dibandingkan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Perbedaan sebesar -33,3477 tersebut mempunyai range antara *lower* (batas bawah) sebesar -80,921 sampai *upper* (batas atas) sebesar 13,966.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan antara daerah lama dengan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Dari hasil statistik diketahui bahwa  $t$  hitung -1,184 dan *prob-value*  $0,032 < \text{tingkat signifikan } 0,1$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kemandirian pembiayaan daerah lama dan daerah baru sesudah adanya pemekaran daerah.

### 4) Hipotesis Keempat

Tabel 6 menggambarkan hasil uji statistik efisiensi anggaran. Dari tabel ter-

sebut dapat dilihat nilai rata-rata (*Mean*) dari efisiensi anggaran daerah lama sesudah pemekaran daerah adalah sebesar 2,55 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (*Mean*) daerah baru sesudah pemekaran daerah yaitu sebesar 1,81. Perbedaan ini dijabarkan dalam tabel lampiran.

Tabel ini menjelaskan hasil uji  $t$  efisiensi anggaran. Disamping itu terdapat perbedaan (*mean*) sebesar 0,741. Ini berarti rata-rata efisiensi anggaran daerah lama lebih tinggi dibandingkan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Perbedaan sebesar 0,741 tersebut mempunyai range antara *lower* (batas bawah) sebesar -0,732 sampai *upper* (batas atas) sebesar 2,213.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat perbedaan antara daerah lama dengan daerah baru sesudah pemekaran daerah. Dari hasil statistik diketahui bahwa  $t$  hitung 0,844 dan *prob-value*  $0,469 > \text{tingkat signifikan } 0,1$  maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efisiensi anggaran daerah lama dan daerah baru sesudah adanya pemekaran daerah.

## d. Pembahasan

### 1) Perbedaan Desentralisasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

Dari deskripsi data penelitian nilai rata-rata (*mean*) desentralisasi fiskal daerah baru sesudah adanya pemekaran daerah lebih kecil dibandingkan rata-rata (*mean*) daerah lama sesudah pemekaran daerah. Hal ini menunjukkan desentralisasi fiskal mengalami penurunan sesudah pemekaran daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah, artinya hipotesis yang pertama ini ditolak.

Desentralisasi menurut Undang-undang 32 tahun 2004 adalah penyerahan we-

wenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dapat diukur dengan menggunakan rumus Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (BHPBP) dibagi dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

Dari laporan realisasi penerimaan daerah Kabupaten/Kota, perkembangan jumlah desentralisasi fiskal cenderung mengalami peningkatan setiap tahun sesudah pemekaran daerah. Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Dwirandra (2006), menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan pemerintah propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada hampir keseluruhan pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

## **2) Perbedaan Upaya Fiskal Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah**

Penelitian ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah.

Menurut Halim (2007) upaya fiskal ini memperlihatkan tingkat dari kemampuan daerah dalam mencapai target dari pen-

dapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Pendapatan Asli daerah diperoleh dari salah satunya melalui pajak daerah.

Dari laporan realisasi penerimaan daerah Kabupaten/Kota, perkembangan jumlah upaya fiskal cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, baik daerah lama maupun daerah baru sesudah pemekaran daerah. Hal ini kemungkinan karena Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup banyak seperti sektor industri, pariwisata, pertambangan yang mana dari berbagai sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut peneliti, Pajak daerah sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, apabila pajak dipungut dengan benar kepada masyarakat, maka pendapatan asli daerah akan meningkat.

## **3) Perbedaan Kemandirian Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah**

Dari deskriptif data penelitian, nilai rata-rata (*mean*) kemandirian pembiayaan daerah baru pemekaran daerah lebih besar dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) sebelum pemekaran daerah. Hal ini menunjukkan kemandirian pembiayaan mengalami kenaikan sesudah pemekaran daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap kemandirian pembiayaan selama periode penelitian menggunakan uji beda dengan *independent sample t-test*, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah. Berdasarkan beberapa kriteria dalam menentukan apakah terdapat atau tidaknya perbedaan kemandirian pem-

biayaan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebelum dan sesudah pemekaran daerah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga ini diterima.

Dari hasil laporan realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat, perkembangan jumlah kemandirian pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahun. Rata-rata penerimaan kemandirian pembiayaan kabupaten/kota sesudah pemekaran daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kemandirian pembiayaan Kabupaten/Kota di Sumatera barat sesudah pemekaran daerah lebih tinggi. Angka kenaikan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran daerah kemandirian pembiayaan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pengeluaran rutin daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007).

#### **4) Perbedaan Efisiensi Anggaran Sesudah Pemekaran Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi anggaran sesudah pemekaran daerah. Dari deskripsi data penelitian, nilai rata-rata (*mean*) efisiensi anggaran sesudah pemekaran daerah lebih kecil dibandingkan rata-rata (*mean*) sebelum pemekaran daerah. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran mengalami penurunan sesudah pemekaran daerah.

Dari deskriptif data penelitian, nilai rata-rata (*mean*) efisiensi anggaran sesudah pemekaran daerah lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) sesudah pemekaran daerah. Hal ini menunjukkan kemandirian pembiayaan mengalami penurunan

sesudah pemekaran daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengeluaran untuk belanja daerah lebih besar dari anggaran yang terdapat untuk belanja daerah.

Menurut Halim (2007) efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Yani, 2009).

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah.
2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah.
3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah.
4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek efisiensi anggaran sesudah pemekaran daerah.

#### **b. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang masih perlu direvisi pada penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan selama periode 5 tahun, karena rentang waktu yang terbatas maka penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Su-

matera Barat, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan pemerintah daerah secara luas.

3. Penelitian ini masih terbatas pada empat variabel penelitian yaitu desentralisasi fiskal, upaya fiskal, kemandirian pembiayaan, efisiensi anggaran saja.

### c. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, agar pemerintah daerah mengevaluasi kinerja pemerintahannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dilihat dari hasil penelitian, bahwa dengan adanya daerah yang melakukan pemekaran, daerah tersebut belum mampu untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar kinerja pemerintah itu lebih bagus.
2. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik, dan penerapan kebijakan serta kewenangan yang lebih jelas.
3. Pemerintah harus lebih cermat dalam meng-anggarkan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.
4. Kebijakan pada bidang keuangan daerah perlu dilakukan dalam upaya menunjang kesinambungan pembangunan dengan meningkatkan kemam-

puan pengelolaan dan sumber keuangan yang handal, efektif, dan efisien. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi.

5. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ghozali, imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit University Diponegoro.
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT.Bina Aksara.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YPKM.
- Mahsun, Firma.S, dan Herbertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed1. Yogyakarta : BPFY. Yogyakarta.
- Mahyeldi. 2009. *Realisasi Pembangunan Padang 2009 Baru Capai 69,76 Persen*, <http://www.Padang.go.id>.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. UADPress. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah tentang Pengeluaran Daerah Tahun 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104-110 Tahun 2000 tentang Regulasi Pengelolaan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 dan Tahun 1996 tentang tata cara penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Rasyidah Mustika.2009. *Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah (Tugas Akhir)*. Politeknik Universitas Andalas.
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No.32 Tahun 2004.
- Ruslina.2003. *Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Tesis)*. Program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se Sumatera Bagian Selatan (Tesis)*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Tri Suprpto.2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004 (Skripsi)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, HAW.2003. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* .Jakarta:Rajawali Pers.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* .Jakarta:Rajawali Pers.

## LAMPIRAN

**Tabel 1 : Variabel Penelitian**

N o.	Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Pengukuran
1	Desentralisasi Fiskal	Ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan.	$\frac{BHPBP}{TPD}$
2	Upaya Fiskal	Ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah	$\frac{PAD}{TP\ APBA}$
3	Tingkat Kemandirian Pembiayaan	Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.	$\frac{PAD}{KP}$
4	Efisiensi Penggunaan Anggaran	Ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah dalam membangun daerahnya.	$\frac{TPL}{TBD}$

Keterangan :

- a. PAD : Pendapatan Asli Daerah
- b. TPD : Total Penerimaan Daerah

- c. TP APBD : Total Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- d. TPL: Total Pengeluaran Lainnya
- e. TBD : Total Belanja Daerah
- f. KP : Pengeluaran Rutin

### A. Statistik deskriptif

**Tabel 2**

**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DF_D.LAMA	25	2.51	50.42	7.0067	9.69625
DF_D.BARU	25	.29	15.28	6.3022	3.82443
UF_D.LAMA	25	.85	6.33	2.8627	1.36596
UF_D.BARU	25	1.63	176.81	15.4189	38.69443
KF_D.LAMA	25	1.26	8.75	4.6873	1.66862
KF_D.BARU	25	1.68	712.40	38.1651	141.42515
EA_D.LAMA	25	.20	19.94	2.5501	3.86653
EA_D.BARU	25	.04	8.32	1.8092	2.07817
Valid N (listwise)	25				

### B. Hasil Uji Beda

#### 1. Desentralisasi Fiskal

**Tabel 3**

**Group Statistics**

Daerah	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Desentralisasi Fiskal Lama	25	7.01	9.696	1.939
Daerah Baru	25	5.92	3.883	.777

**Independent Samples Test**

	Desentralisasi Fiskal	
	Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for F Equality of Variances	1.142 .291	
t-test for Equality of Means	.520	.520
df	48	31.504
Sig. (2-tailed)	.605	.607
Mean Difference	1.087	1.087
Std. Error Difference	2.089	2.089
90% Confidence Interval of the Difference	Lower -2.417 Upper 4.590	Lower -2.453 Upper 4.627

Sumber: Data Olahan SPSS

	Upaya Fiskal	
	Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test F for Equality of Variances	7.874 .007	
t-test for Equality of Means	-1.621	-1.621
df	48	24.060
Sig. (2-tailed)	.111	.118
Mean Difference	-12.556	-12.556
Std. Error Difference	7.744	7.744
90% Confidence Interval of the Difference	Lower -25.544 Upper .432	Lower -25.803 Upper .691

Sumber: Data Olahan SPSS

**2. Upaya Fiskal**

**Tabel 4**

**Group Statistics**

Daerah	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Upaya Fiskal Daerah Lama	25	2.86	1.366	.273
Daerah Baru	25	15.42	38.694	7.739

Sumber: Data Olahan SPSS

**3. Kemandirian Pembiayaan**

**Tabel 5**

**Group Statistics**

Daerah	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kemandirian Fiskal Daerah Lama	25	4.69	1.669	.334
Daerah Baru	25	38.17	141.425	28.285

Sumber: Data Olahan SPSS

**Independent Samples Test**

	Kemandirian Fiskal	
	Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	4.851	.032
t-test for Equality of Means	-1.184	-1.184
df	48	24.007
Sig. (2-tailed)	.242	.248
Mean Difference	-33.478	-33.478
Std. Error Difference	28.287	28.287
90% Confidence Interval of the Difference	-80.921	-81.873
	13.966	14.917

Sumber: Data Olahan SPSS

**Independent Samples Test**

	Efisiensi Anggaran	
	Equal variances assumed	Equal variances not assumed
Levene's Test for Equality of Variances	.534	.469
t-test for Equality of Means	.844	.844
df	48	36.798
Sig. (2-tailed)	.403	.404
Mean Difference	.741	.741
Std. Error Difference	.878	.878
90% Confidence Interval of the Difference	-.732	-.740
	2.213	2.222

Sumber: Data Olahan SPSS

**4. Efisiensi Anggaran**

**Tabel 6**

**Group Statistics**

Daerah	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Efisiensi Anggaran Daerah Lama	25	2.55	3.867	.773
Daerah Baru	25	1.81	2.078	.416

Sumber: Data Olahan SPSS